LAPORAN CALK LAPORAN KEUANGAN

BALAI KARANTINA HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BULAN JANUARI 2025

Badan Karantina INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN BA.127
SEMERTER II
TAHUN ANGGARAN 2024

BALAI KARANTINA HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jln. Adisucipto km 08 Maguwoharjo Sleman Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

BKHIT DI Yogyakarta adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Karantina Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BKHIT DI Yogyakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Yogyakarta, 31 Desember 2024

Ka. BKHIT DI YOGYAKARTA

Drh. Ina Soelistyani
NIP. 196905251998032001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Surat Pernyataan Tanggung Jawab iv

Ringkasan Laporan Keuangan v

I. Laporan Realisasi Anggaran 1
II. Neraca 2
III. Laporan Operasional 3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas 4
V. Catatan Atas Laporan Keuangan 5
A. Penjelasan Umum 5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis 5
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 7
A.3 Basis Akuntansi 7
A.4 Dasar Pengukuran 7
A.5 Kebijakan Akuntansi 8
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 17
B.1 Pendapatan 17
B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak 18
B.2 Belanja 19
B.2.1 Belanja Pegawai 21
B.2.2 Belanja Barang 22
B.2.3 belanja Modal 22
B.2.3.1 Belanja Modal Tanah 23
B.2.3.2 Belanja Peralatan dan Mesin 23
B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 24
B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 25
B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya 25
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca 26
C.1 kas di Bendahara Pengeluaran 26
C.2 Piutang Bukan Pajak 26
C.3 Persediaan 26
C.4 Tanah 27

C.5 Peralatan dan Mesin 27
C.6 Gedung dan Bangunan 28
C.7 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 28
C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 29
C.9 Aset Lain-Lain 30
C.10 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 30
C.11 Utang Kepada Pihak Ketiga 30
C.12 Uang Muka dari KPPN 31
C.13 Ekuitas 31
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional 32
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak 32
D.2 Beban Pegawai 33
D.3 Beban Persediaan 34
D.4 Beban Barang dan Jasa 34
D.5 Beban Pemeliharaan 35
D.6 Beban Perjalanan Dinas 36
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi 37
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 37
D.9 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar 37
D.10 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 38
D.11 Pos Luar Biasa 38
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 39
E.1 Ekuitas Awal 39
E.2 Surplus (Defisit) LO 39
E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas 39
E.3.1 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi 39
E.4 Transaksi Antar Entitas 39
E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) 40
E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar 40
E.5 Ekuitas Akhir 40
F. Pengungkapan Penting Lainnya 40
F.1 Kejadian-Kejadian Setelah Tanggal Neraca 40
F.2 Pengungkapan Lain-Lain 40
F.3 Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN 42
F.4 Pengungkapan Program Prioritas Nasional 43
VI. Lampiran dan Daftar

BADAN KARANTINA INDONESIA
Balai Karantina Heawan Ikan Dan Tumbuhan DI Yogyakarta
Jln Adisucipto Km.08 Maguwoharjo Sleman Yogyakarta
Telp: (0282) 521870, 534243 Fak: (0282) 533920
Email: BKHITyiogya@gmail.com, skpkelas1cilacap@pertanian.go.id
Website: cilacap.karantina.pertanian.go.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BKHIT DI Yogyakarta yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Yogyakarta, 31 Desember 2024

Ka. BKHIT DI YOGYAKARTA

Drh. Ina Soelistyani
NIP. 196905251998032001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BKHIT DI Yogyakarta Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.717.958.853 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.717.958.853 atau mencapai 81,00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp2.108.280.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp15.365679.868 atau mencapai 99,00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp15.580.748.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2024 . Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp977.367.235 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp633.527.671; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp343.839.564 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp977.367.235.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk

penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.717.958.853 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp-14.604.749.084 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp12.886.790.231, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing- masing sebesar Rp0 dan Rp12.886.790.231 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp12.886.790.231.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp0, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp12.886.790.231 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp13.864.157.466 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp977.367.235.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yan diharuskan dan dianjurkan oleh Standar AKuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan perdasarkan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

U R A I A N	Catatan	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	**B.1**				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	2.108.280.000	1.717.958.853	81	0
JUMLAH PENDAPATAN		2.108.280.000	1.717.958.853	**81**	0
BELANJA	**B.2**				
Belanja Pegawai	B.2.1	7.396.735.000	7.395.992.951	100,00	0
Belanja Barang	B.2.2	7.970.738.000	7.757.257.417	97,00	0
Belanja Modal	B.2.3	213.275.000	212.429.500	100,00	0
JUMLAH BELANJA		15.580.748..000	15.365.679.868	**99,00**	**0**

Yogyakarta, 31 Desember 2024

Ka. BKHIT DI YOGYAKARTA

Drh. Ina Soelistyani

NIP. 196905251998032001

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

U R A I A N	Catatan	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.2	-	-
Persediaan	C.3	633.527.671	0
Jumlah Aset Lancar		633.527.671	0
ASET TETAP			
Tanah	C.4	0	0
Peralatan dan Mesin	C.5	1.891.211.302	0
Gedung dan Bangunan	C.6	0	0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.7	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.8	(1.547.371.738)	0
Jumlah Aset Tetap		**343.839.564**	**0**
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.9	0	13.420.000
Aset Lain-lain	C.10	0	430.122.910
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.11	0	-427.576.310
Jumlah Aset Lainnya		**0**	**15.966.600**
JUMLAH ASET		**977.367.235**	**60.709.982.711**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.11	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.12	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**-**	**-**
JUMLAH KEWAJIBAN		**-**	**-**
EKUITAS			
Ekuitas	C.13	**977.367.235**	**0**
JUMLAH EKUTAS		**977.367.235**	**0**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**977.367.235**	**0**

Yogyakarta, 31 Desember 2024

Ka.BKHIT DI YOGYAKARTA

Drh. Ina Soelistyani

NIP. 196806181989031003

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	1.717958.853	0
Jumlah Pendapatan		1.717958.853	0
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	7.395.992.951	0
Beban Persediaan	D.3	207.724.918	0
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.909.362.453	0
Beban Pemeliharaan	D.5	1.825.696.806	0
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.219.409.775	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	46.562.181	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-
Jumlah Beban		**-14.604.749.084**	**0**
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		**12.886.790.231**	**0**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.9	-	0
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.10	-	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya	D.11	-	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		**-**	**0**
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		**12.886.790.231**	**0**
Pos Luar Biasa	D.12		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT – LO		**12.886.790.231**	**0**

Yogyakarta, 31 Desember 2024

Ka. BKHIT DI Yogyakarta

Drh. Ina Soelistyani

NIP. 196905251998032001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DWSEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	**(12.886.790.231)**	**0**
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	**0**	**0**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		**-**	**-**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	**-**	**0**
Penyesuaian Nilai Aset	E.31	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.32	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.33	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.34	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.35	-	**6.542.600**
Koreksi Lain-Lain	E.36	-	-
Jumlah		**-**	**-**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	**13.864.157.466**	0
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		977.367.235	0
EKUITAS AKHIR	E.5	**977.367.235**	**0**

Yogyakarta, 31 Desember 2024

Ka. BKHIT DI Yogyakarta

Drh. Ina Soelistyani

NIP. 196905251998032001

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar hukum Entitas dan Rencana Strategis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

BKHIT DI Yogyakarta Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/VI/2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Karantina Pertanian, tugas pokok BKHIT DI Yogyakarta adalah melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.

Dalam melaksanakan tugas tersebut BKHIT DI Yogyakarta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan.
- Pelaksanaan Pemeriksaan, Pengasingan, Pengawasan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan dan Pembebasan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisame Penganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).
- Pelaksanaan Pemantuan Daerah Sebar HPHK dan OPTK
- Pelaksanaan Pembuatan Koleksi HPHK dan OPTK
- Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Hayati, Hewani dan Nabati
- Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Operasional Karantina Hewan dan Tumbuhan
- Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Operasional Keamanan Hayati dan Nabati
- Pengelolaan Sistem Informasi, Dokumentasi dan Sarana Teknik Karantina Hewan dan Tumbuhan

- Pelaksanaan Pengawasan dan Penindalan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati

- Pelaksanaan unsur Tata Usaha dan Rumah Tangga Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka BKHIT DI Yogyakarta mempunyai tujuan pembangunan sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas pelaksanaan tindakan karantina pertanian lingkup BKHIT DI Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan standar rekomendasi yang ditetapkan

- Meningkatkan kualitas pelayana karantina pertanian di lingkup Wilayah Kerja BKHIT DI Yogyakarta.

- Meningkatkan pemantapan peraturan perundang-undangan dalam rangka penegakan hukum

Untuk mewujudkan tujuan di atas BKHIT DI Yogyakarta berkomitmen dengan visi "*Menjadi Instansi Yang Tangguh dan Terpercaya dengan memberikan Pelayanan Berkualitas dan Terukur Dengan Didukung Administrasi Yang Tertib*"

Untuk mencapai Visi diatas, maka BKHIT DI Yogyakarta mempunyai Misi sebagai berikut :

- Melindungi kelestarian sumber daya alam hayati hean dan tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina Hewan (HPHK) dan Organisme Penganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) sesuai dengan Wilayah Kerja dan Wilayah Layanan yang berlaku

- Mendukung terwujudnya keamanan pangan

- Mendukung Badan Karantina Indonesia dalam rangka fisilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan

Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 31 Desembe 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh **BKHIT DI Yogyakarta**. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yatu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

Basis Akuntansi

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemeirntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntans

A.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik- praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian yang merupakan entitas pelaporan dari BKHIT DI Yogyakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak

Pendapatan- LRA

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan – LO

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas

pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.

b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran.

Belanja

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi bersadarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau

potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan**.**

Aset

(5) Aset

Aset Lancar

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung sengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value)* . Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan First In First Out (FIFO). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai

persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Penggunaan Metode Penilaian FIFO ini sesuai dengan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan. Sebagaimana diatur dalam PMK 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dampak perubahan metode penilaian ini bersifat prospektif. Diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp..25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ;
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya

Penyusutan Aset Tetap

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

c. **Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap :
  a. Tanah ;
  b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun

Piutang Jangka Panjang

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

Aset Lainnya

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesai nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi**..**

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	**Masa Manfaat (Tahun)**
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit	10

TeRp.adu	
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

Kewajiban

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Ekuitas

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan

- Kewajiban dicatat sebesai nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih dari aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2024	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.108.280.000	2.108.280.000
Jumlah Pendapatan	2.108.280.000	2.108.280.000
Belanja		
Belanja Pegawai	7.396.735.000	7.396.735.000
Belanja Barang	7.970.738.000	7.970.738.000
Belanja Modal	213.275.000	213.275.000
Jumlah Belanja	15.580.748.000	15.580.748.000

B. 1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Rp. 488.800

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.717.958.853 atau mencapai 81,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.108.280.000. Pendapatan BKHIT DI Yogyakarta terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.717.958.853.

Realisasi pendapatan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.717.958.853. mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2023 sebesar Rp.0. Hal ini dikarenakan terbitnya Perpres 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, dan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan No. 27 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang berlaku pada Badan Karantina Indonesia dimana pada pasal 6 menyatakan "PNBP yang telah disetorkan dan dicatatkan sebagai PNBP pada Kementerian Pertanian dan/atau Kementerian Kelautan dan Perikanan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan Peraturan Menteri ini mulai berlaku (16 Mei 2024) dialihkan/dicatatkan menjadi PNBP pada Badan Karantina Indonesia (BARANTIN).

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.108.280.000	1.717.958.853	-
Jumlah	2.108.280.000	1.717.958.853	**-**

Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 100,00 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.717.958.853	0	100
Jumlah	1.717.958.853	0	**100**

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rp. 488.800

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing- masing sebesar Rp1.717.958.853 dan Rp0. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 100 persen dari TA 2023 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada periode September 2024 mengalami penurunan yaitu 100% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023. Hal ini dikarenakan terbitnya Perpres 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, dan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan No. 27 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang berlaku pada Badan Karantina Indonesia dimana pada pasal 6 menyatakan "PNBP yang telah disetorkan dan dicatatkan sebagai PNBP pada Kementerian Pertanian dan/atau Kementerian Kelautan dan Perikanan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan Peraturan Menteri ini mulai berlaku (16 Mei 2024) dialihkan/dicatatkan menjadi PNBP pada Badan Karantina Indonesia (BARANTIN).

Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak	1.717.958.853	0	100
Jumlah	1.717.958.853	0	**100**

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBP Lainnya
Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	-	-	100,00
Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	100,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	100,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	519.480	-	
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	886.970	-	100,00
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	-	-	100,00
Jumlah	1.406.450	**-**	100,00

B. 2 Belanja

Realisasi Belanja Rp836.879.948

Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp15.365.679.868 atau 100,00 % dari anggaran belanja sebesar Rp.15.580.748.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2024

U R A I A N	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	7.396.735.000	7.395..992.951	100,00
Belanja Barang	7.970.738.000	7.757.257.417	97,00
Belanja Modal	213.275.000	212.429.500	100,00
Jumlah	15.580.748.000	836.879.948	**99,00**

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2024

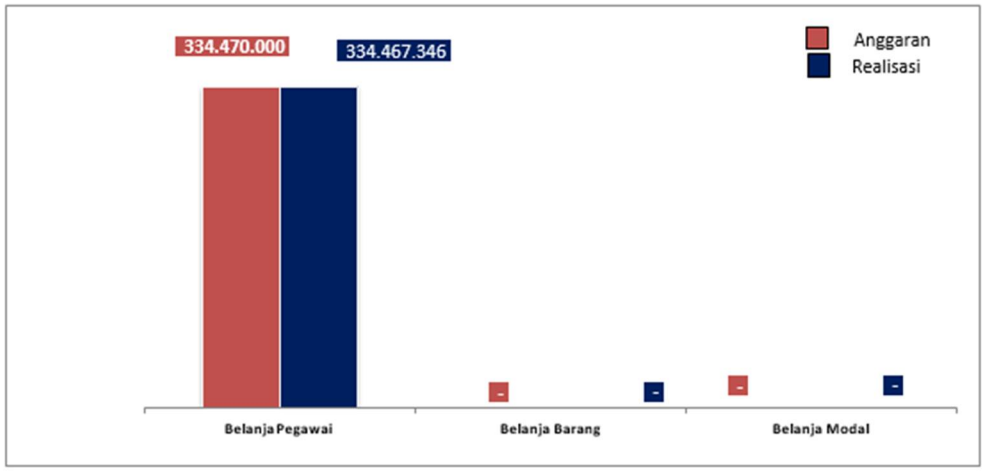

Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 95,60% Realisasi Belanja pada periode Desember 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi belanja barang pada periode Desember 2023. Hal ini dikarenakan adanya transformasi organisasi ke Badan Karantina Indonesia sehingga dilakukan revisi DIPA yang mengubah pagu anggaran hanya untuk belanja pegawai bulan Januari dan Februari 2024. Berikut rincian realisasi belanja TA 2024 dan TA 2023

Perbandingan Realisasi Belanja Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%

Belanja Pegawai	7.395.992.951	-	100
Belanja Barang	7.757.257.417	-	100
Belanja Modal	212.429.500	-	100
Jumlah	15.580.748.000	**-**	100

Realisasi Belanja Pegawai Rp836.879.948

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.395.992.951 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 100,00 % dari TA 2023. Hal ini disebabkan Belanja pegawai pada periode Desember 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan belanja pegawai pada periode Desember 2023. Hal ini dikarenakan adanya proses transformasi organisasi sehingga pada tahun 2024 pembayaran pegawai hanya dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari saja. Pembayaran berikutnya dilaksanakan oleh satker baru yaitu BKHIT Yogyakarta.

Perbandingan Belanja Pegawai Semester II TA 2024 dan 2023

RAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Gaji Pokok PNS	4.795.026.800	-	100
Belanja Pembulatan Gaji PNS	62.061	-	100
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	345.634.760	-	100
Belanja Tunj. Anak PNS	109.510.830	-	100
Belanja Tunj. Struktural PNS	17.640.000	-	100
Belanja Tunj. Fungsional PNS	706.431.000	-	100)
Belanja Tunj. PPh PNS	56.887.540	-	100
Belanja Tunj. Beras PNS	252.600.960	-	100
Belanja Uang Makan PNS	808.440.000	-	100
Belanja Tunjangan Umum PNS	29.905.000	-	100
Belanja Uang Lembur	273.854.000	-	100
Belanja Pegawai (Tunjangan	-	-	-

Khusus/ Kegiatan)			
Beban Gaji Pokok PPPK	-	-	-
Beban Pembulatan Gaji PPPK	-	-	-
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	-	-	-
Beban Tunjangan Anak PPPK	-	-	-
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	-	-	-
Beban Tunjangan Beras PPPK	-	-	-
Beban Uang Makan PPPK	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	**7.395.992.951**	**-**	**100**
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	**7.395.992.951**	**-**	**100**

Realisasi Belanja Barang Rp.7.757.257.417

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.757.257.417 dan Rp0. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami penurunan sebesar 100,00% dari Realisasi TA 2023.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Realisasi Belanja pada periode Desember 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi belanja barang pada periode Desember 2023. Hal ini dikarenakan adanya revisi DIPA yang mengubah pagu anggaran hanya untuk belanja pegawai bulan Januari dan Februari 2024.

Realisasi Belanja Modal Rp.212.429.500

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp212.429.500 dan Rp0. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan TA 2023 disebabkan oleh Realisasi Belanja pada periode Desember 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi belanja barang pada periode Desember 2023.

Perbandingan Belanja Modal Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	212.429.500	-	100
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	100
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	212.429.500	**-**	**100,00**
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	212.429.500	**-**	**100,00**

B.2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Rp0

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat belanja modal tanah selama TA 2024.

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.212.429.500

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp212.429.500 dan Rp0, mengalami kenaikan sebesar 100,00 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan oleh Realisasi Belanja pada periode Desember 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi belanja barang pada periode Desember 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	212.429.500	-	100,00
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	212.429.500	-	100,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	212.429.500	-	100,00

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp.0

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 tidak mengalami perubahan dibandingkan Realisasi TA 2023. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada periode Desember 2024 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan realisasi belanja barang pada periode Desember 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	-	-
Pengembalian Belanja	-	**-**	**-**
Jumlah Belanja	**-**	-	-

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan Tidak

ada kenaikan/penurunan untuk belanja modal jalan irigasi dan jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan Tidak ada kenaikan/penurunan terhadap belanja modal lainnya.

Realisasi Belanja Modal Lainnya Rp.0

C. PENDEKATAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. Rp. 0

C.1 Kas di Bendahara pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Piutang Bukan Bajak Rp. 0

C.2 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

C.3 Persediaan

Persediaan Rp633.527.671

Nilai Persediaan tanggal 30 September 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp633.527.671 dan Rp0. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Persediaan Semester II TA 2024 dan 2023

Jenis	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Barang Konsumsi	633.527.671	-
	-	-
Jumlah	633.527.671	-

C.4 Tanah

Tanah Rp.0

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Nilai Tanah tersebut Nilai tanah tidak mengalami kenaikan/penurunan.Aset Tetap masih dalam proses Likuidasi dari Kementan ke Barantin Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	
Saldo per 30 Desember 2024	-

C.5 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp1.891.211.302 dan Rp0. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-
Mutasi Kurang:	
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

C. 6 Gedung dan Bangunan

Peralatan dan Mesin Rp0

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
Penyelesaian Pembangunan Langsung	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

C. 7 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 September 2024 dan 2023 adalah Rp. 0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.0

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp-1.547.371.738 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

C.9 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Tida ada mutasi Aset Lain-lain

.

C. 10 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31

Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapsitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp1.547.371.738

.

C. 11 Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Tidak ada Utang Kepada Pihak Ketiga karena pembayaran Listrik,Telepon dan Air sudah dibayarkan dengan uang TUP pada bulan Desember 2024.

C. 12 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persedian	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	**-**

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Tidak ada saldo uang muka dari KPPN.

Aset Lain-lain Rp.0

C. 13 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp977.367.235. dan Rp0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Ekuitas
Rp19.242.914.737

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp. 1.717.958.853

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.717.958.853 dan Rp0.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut

.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	886.970	-	100
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	157.025.500	-	100
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	1.312.846.904	-	100
Pendapatan Jasa Lainnya	242.329.999	-	100
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	4.350.000	-	100
Pendapan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	519.480		100
Jumlah	1.717.958.853	**-**	100

Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 100 persen. Hal tersebut dikarenakan terbitnya Perpres 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, dan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan No. 27 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang berlaku pada Badan Karantina Indonesia dimana pada pasal 6 menyatakan "PNBP yang telah disetorkan dan dicatatkan sebagai PNBP pada Kementerian Pertanian dan/atau Kementerian Kelautan dan Perikanan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan Peraturan Menteri ini mulai berlaku (16 Mei 2024) dialihkan/dicatatkan menjadi PNBP pada Badan Karantina Indonesia (BARANTIN).

Berdasarkan tabel di atas, beberapa uraian realisasi pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp. 886.970 merupakan pendapatan yang berasal dari sewa rumah dinas.

Beban Pegawai Rp7.395.992.951

2. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaaan Pemerintah sebesar Rp 519.480 merupakan pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah.

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.395.992.951 dan Rp0.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar 100 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Realisasi Belanja pada periode Desember 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi belanja barang pada periode Desember 2023..

Rincian Beban Pegawai Semester II Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai

Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023	%
Beban Gaji Pokok PNS	4.795.026.800	-	100
Beban Pembulatan Gaji PNS	62.061	-	100
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	345.634.760	-	100)
Beban Tunj. Anak PNS	109.510.830	-	100)
Beban Tunj. Struktural PNS	17.640.000	-	100
Beban Tunj. Fungsional PNS	706.431.000	-	100
Beban Tunj. PPh PNS	56.887.540	-	100
Beban Tunj. Beras PNS	252.600.960	-	100
Beban Uang Makan PNS	808.440.000	-	100
Beban Tunjangan Umum PNS	29.905.000	-	100
Beban Uang Lembur	273.854.000	-	100
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	-	-	-
Beban Gaji Pokok PPPK	-	-	-
Beban Pembulatan Gaji PPPK	-	-	-
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	-	-	-

Beban Tunjangan Anak PPPK	-	-	-
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	-	-	-
Beban Tunjangan Beras PPPK	-	-	-
Beban Uang Makan PPPK	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	**7.395.992.951**	**-**	100

Beban Persediaan Rp207.724.918

D. 3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing- masing sebesar Rp207.724.918 dan Rp0.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 100 persen dibandingkan dengan Tahun 2023.

Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah

Rincian Beban Persediaan

Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023	%
Beban Persediaan konsumsi	207.724.918	-	100
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	207.724.918	-	**100**

D. 4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp.3.909.362.453

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31Desember 2024 dan 2023 adalah masing- masing sebesar Rp3.909.362.453 dan Rp0.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 100,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2023.

Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa

Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023	%
Beban Keperluan Perkantoran	1.607.881.210	-	100,00
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	442.301.555	-	100,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.039.865	-	100,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	104.816.000	-	100,00
Beban Bahan	394.807.615	-	100,00
Beban Langganan Listrik	-	-	100,00
Beban Langganan Telepon	-	-	100,00
Beban Langganan Air	-	-	100,00
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	-	-	100,00
Beban sewa	-	-	100,00
Beban jasa profesi	-	-	100,00
Beban jasa lainnya	-	-	100,00
Jumlah	3.909.362.453	**-**	100,00

D. 5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.825.696.806 dan Rp.

Beban Pemeliharaan Rp. 1.825.696.806

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2024 mengalami sebesar 100,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2023.Pemeliharaan Aset Tetap dalam proses likuidasi dari Kementan ke Barantin.

Bukti kepemilikan Asset masih di Kementrian Pertanian berdasarkan surat pengusulan pengalihan Asset No.4556/PL.310/A/12/2024.

Rincian Beban Pemeliharaan Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	574.446.968	-	(100,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	100.239.684	-	(100,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.037.457.552	-	(100,00)
Beban Pemeliharaan Jaringan	113.552.602	-	(100,00)
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	**1.825.696.806**	**-**	**(100,00)**

D. 6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp. 1.219.409.775

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.219.409.775 dan Rp0.

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 100,00 persen.

Rincian Beban Perjalanan Dinas

Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2024	%
Beban Perjalanan Biasa	443.999.681	-	100
Beban Perjalanan Tetap	236.501.400	-	100
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	63.060.000	-	100
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	130.111.000	-	100
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	345.737.694	-	100
	-	-	-
Jumlah	1.219.409.775	**-**	**100**

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp46.562.181 dan Rp0.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp46.562.181

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

D. 8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

D.9 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	0
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-		0
Jumlah	**-**	-	**0**

D. 10 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp.. 0

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0..

Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Rp.0

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya

Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2023	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	0
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	-	-	0
Beban Kerugian Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-
Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	**-**	**-**	**0**

D.11 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasinal Lainnya Rp.0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas.

Pos Luar Biasa Rp0

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp0

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E. 2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO Rp12.886.790.231

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.12.886.790.231 dan Rp.0. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E. 3 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing- masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E. 3. 1 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp.0

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0.

E. 4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp13.864.157.466

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.13.864.157.466 dan Rp.0. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian/Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2024

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	15.365.679.868
Diterima dari Entitas Lain	(1.717.958.853)
Transfer Keluar	216.436.451
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	**13.864.157.466**

E. 4. 1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DKEL sebesar Rp 15.365.679.868, sedangkan DDEL sebesar Rp 1.717.958.853.

E. 4. 2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp216.436.451. .

E. 5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.977.367.235 dan Rp.0.

Ekuitas Akhir
Rp19.242.914.737

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F. 1 Kejadian-Kejadian Setelah Tanggal Neraca

-

F. 2 Pengungkapan Lain-Lain

-

Lampiran